



KPK Periksa Kepala Dinas PUPKP Yogya

Menjadi Saksi Terkait Dugaan Suap Proyek Saluran Air Hujan

JAKARTA, TRIBUN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryanto.

Dia bakal menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap lelang proyek pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019. "Saksi direncanakan diperiksa untuk tersangka GYA (Gabriella Yuan Ana)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (11/9).

Dalam perkembangannya, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi terkait perkara ini. Pada Jumat (23/8), tim KPK menggeledah rumah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, ALN. Dari sana, tim menyita uang Rp130 juta. "Uang ini kami duga masih terkait dengan proyek yang ada di dinas tersebut," ujar Febri saat itu.

Kemudian, pada Rabu (21/8) dan Kamis (22/8), KPK melakukan penggeledahan di Solo dan Yogyakarta. Sejumlah lokasi yang dikeledah itu, yakni kantor PT Kusuma Chandra dan kantor PT Mataram Mandiri yang berada di Solo.

Selain itu, tim penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPKP dan kantor Badan Layanan Pengadaan (BLP) Yogyakarta.

Dari penggeledahan di sejumlah lokasi selama dua hari tersebut, tim penyidik menyita dokumen-dokumen penting terkait proyek di Dinas PUPKP yang digarap kedua perusahaan tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang juga anggota TP4D (Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah), ES, dan SS, jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai tersangka dugaan suap lelang di Dinas PUPKP Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019.

Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan lembaga antirasuah terhadap Direktur Utama PT, Manira Arta Mandiri, GYA. Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif para pihak yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8).

Dalam kasus ini, ES dan SS diduga menerima suap

dari GYA agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Prof Dr Soepomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

Proyek tersebut seharusnya diawasi oleh ES selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara SS merupakan jaksa yang mengenalkan GYA ke ES. Atas bantuan ES, PT Windoro Kandang (WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam GYA memenangkan lelang proyek tersebut.

Atas bantuannya tersebut, ES dan SS diduga telah menerima suap dari GYA sebesar Rp221.740.000 dalam tiga tahap. Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 5% dari nilai kontrak proyek sebesar Rp8,3 miliar yang telah disepakati ketiga tersangka.

Sementara sisa fee direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019. Namun, tim Satgas KPK lebih dulu meringkus sejumlah pihak terkait dalam OTT pada Senin (19/8) atau sesaat setelah terjadinya transaksi suap tahap ketiga.

Tak Lanjut

Ditanggapi

Diketahui

Biasa

Jumpa Pers



Memberikan informasi

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, Agus Tri Haryono memang ke Jakarta dalam rangka menjadi saksi kasus dugaan suap proyek SAH. "Yang dipanggil cuma Pak Agus karena dia sebagai kepala dinasnya," ujarnya di RS Pratama, Rabu (11/9).

Heroe, mengatakan, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk memberikan informasi ke KPK. "Kita ikuti karena ini jadi bagian dari pemeriksaan terkait kesaksian-kesaksian. Prinsipnya kasus sudah jalan, KPK memerlukan informasi terkait persoalannya. Karena sebagian persoalannya ada di DPUPKP, dan mereka akan memberikan informasi yang mereka ketahui," bebernya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini tak hanya Agus yang berada di Jakarta, namun juga beberapa orang dari DPUPKP. Hal ini lantaran Pemkot Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili DPUPKP, juga mencari jalan keluar terkait proyek SAH yang mangkrak pasca-OTT KPR yang melibatkan kontraktor serta dua jaksa.

"Pak Agus akan minta informasi dan advice. Pemkot berharap masih bisa melanjutkan entah dengan pemutusan (dengan kontraktor lama), kemudian kita bisa melanjutkan lelang atau penunjukan. Ke Jakarta dalam rangka konsultasi baik dengan KPK dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) apa yang bisa kita lakukan," terang Heroe.

Saat ini, ia menyebut bahwa proyek tersebut masih dibiarkan sesuai keadaan yang ada. "Karena menunggu kesamaan. Jangan sampai kita niatnya ingin tidak ada dampak di masyarakat tapi nanti (KPR) tidak berkesman," ujarnya.

Selanjutnya, Heroe berharap sepulangannya dari Jakarta, tim DPUPKP Kota Yogyakarta bisa membawa kejelasan mengenai proyek SAH tersebut. "Apakah kita berhenti tapi itu merugikan masyarakat, atau kita hanya bisa menutup saja, atau kita melanjutkan," pungkasnya.

Dampingi DPUPKP

Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta, Maryoto, mengatakan, pihaknya saat ini mendampingi pihak Dinas PUPKP Kota Yogyakarta untuk menyerahkan berkas ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Selama ini pihaknya dan DPUPKP Kota Yogyakarta sudah menjalin komunikasi dengan LKPP secara online. Namun baru Rabu (11/9) mengirimkan surat resmi, beserta berkas pendukung lain. "Saat ini kami masih menunggu. Kami sudah berkomunikasi dengan LKPP secara online, bagaimana baiknya pengerjaannya, kami juga lampirkan beberapa berkas seperti foto pembuatan SAH, kami kirimkan hari ini (Rabu, 11/9)," katanya, kemarin.

Ia melanjutkan, sebelum berkonsultasi dengan LKPP, DPUPKP Kota Yogyakarta juga telah berkomunikasi dengan KPK. Hal itu karena, saat ini proyek SAH Jalan Prof Dr Soepomo menjadi ranah KPK, sebagai proyek suap dan gratifikasi.

Inspektorat Kota Yogyakarta pun tidak memiliki kendali lebih. Hingga Rabu kemarin, KPK belum memberikan rekomendasi atas pengerjaan proyek tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta masih menunggu rekomendasi dan hasil dari KPK. "Kami belum menerima hasilnya, jadi ya kami hanya bisa menunggu, karena itu (SAH Supomo) sekarang adalah ranah KPK," ujarnya. (kur/maw/tribunnews)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005